

SINOPSIS

Penelitian yang berjudul “STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH ATAS BADAN AKREDITASI SEKOLAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” dilakukan karena masih banyaknya sekolah yang belum paham tentang kebijakan akreditasi sehingga memunculkan pendapat dan pandangan yang tidak sesuai dengan isi kebijakan akreditasi yang sesungguhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kebijakan akreditasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no 087 /U/ 2002 dan Keputusan Gubernur no 30 Tahun 2004 tentang pembentukan BAS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta mengetahui tentang bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan dilaksanakan oleh Bas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian dilaksanakan di sekretariat BAS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi.

Analisa penelitian terhadap studi implementasi kebijakan akreditasi sekolah menengah atas badan akreditasi sekolah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilaksanakan pemerintah daerah dan didukung oleh aparat pelaksana yaitu Dinas Pendidikan Propinsi, dan BAS Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Kebijakan akreditasi sekolah sudah baik, namun dalam pelaksanaan implementasinya belum maksimal mengingat kebijakan ini masih baru keberadaannya, ini dapat dilihat dari kebijakan akreditasi sekolah belum sampai kepada semua sasaran (sekolah) yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selain itu masih banyaknya pemahaman yang berbeda untuk pelaksanaan akreditasi yang sesungguhnya. Sehingga pemerintah daerah perlu lebih mensosialisasikan kebijakan akreditasi agar program akreditasi dapat memasyarakat disekolah yang akan diakreditasi.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasannya penulis mengajukan saran-saran kepada Badan Akreditasi Sekolah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan harapan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan BAS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan akreditasi sekolah menengah Atas : peningkatan sosialisasi ataupun penyuluhan secara berkesinambungan kesekolah-sekolah (sasaran). Faktor penghambat : kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki BAS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.